



**Prosiding Pendidikan Sejarah
TAK PANTANG ARAL MELINTANG: PERJUANGAN PGRI DALAM PERBAIKAN
NASIB GURU DI DKI JAKARTA (1998-2005)**

Taufik, Nurbaity, Julia Sekar Ayu
Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

nurbaity_muthalib@yahoo.com

(08159939533, 08121997655, 089505787455)

Abstract

PGRI is a teacher organization in Indonesia that was historically formed exactly 100 days after the proclamation of Indonesian independence and until now its birth date has been used as Teachers' Day in Indonesia. PGRI as a professional organization plays an important role in improving teacher competence in carrying out the main responsibility in the transformation of science, technology, and the arts of students. In accordance with its vision and mission, PGRI always moves to fight for the basic rights of teachers (educators), allowances received by educators and the welfare provided. In writing this article using the historical method which includes four steps of activity including heuristic, the step of collecting sources some of which are obtained from the Kompas newspaper, PGRI organization books, and others. The second stage is criticism, consisting of internal and external criticism. The third stage is interpretation or interpretation and the last stage is writing history or historiography. The findings of this study are that PGRI even until now continues to fight for the achievement of educators' interests related to professionalism, protection of human rights, and educator welfare. PGRI is not afraid to face challenges even though this organization often gets tests and challenges. The struggle carried out by PGRI through parliamentary channels until the formation of the Teachers and Lecturers Law in 2005, the media and demonstration movements.

Keywords: Organization, PGRI, Educators, Welfare

Abstrak

PGRI merupakan organisasi guru di Indonesia yang dalam sejarah terbentuknya tepat 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan hingga saat ini tanggal kelahirannya dijadikan hari guru di Indonesia. PGRI sebagai organisasi profesi berperan penting untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memikul tanggung jawab utama dalam transformasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni peserta didik. Sesuai dengan visi dan misinya, PGRI selalu bergerak memperjuangkan hak asasi guru (pendidik), tunjangan yang didapatkan oleh para pendidik dan kesejahteraan yang diberikan. Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode sejarah yang meliputi empat langkah kegiatan diantaranya adalah heuristik, langkah pengumpulan sumber yang beberapa diperoleh dari surat kabar Kompas, buku-buku organisasi PGRI, dan lain-lainnya. Tahap kedua adalah kritik, terdiri atas kritik intern dan ekstern. Tahap ketiga adalah interpretasi atau penafsiran dan tahap terakhir adalah penulisan sejarah atau historiografi. Hasil temuan dari penelitian ini bahwa PGRI bahkan hingga saat ini terus berjuang untuk tercapainya kepentingan pendidik terkait dengan profesionalisme, perlindungan atas hak asasi, maupun kesejahteraan pendidik. PGRI tak gentar dalam menghadapi tantangan sekalipun organisasi ini seringkali mendapat terpaan ujian dan tantangan. Perjuangan yang dilakukan oleh PGRI melalui jalur parlemen hingga terbentuknya UU Guru dan Dosen Tahun 2005, media maupun gerakan unjuk rasa.

Kata kunci: Organisasi, PGRI, Pendidik, Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Kegiatan dan perjuangan dalam membangun serta mencerdaskan kehidupan masyarakat adalah hal paling penting dan merupakan tujuan suatu negara. Dalam hal ini sangat diharapkan suatu aktivitas pendidikan yang bisa menghasilkan masyarakat yang dapat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas dan kepribadian sumber daya manusia Indonesia. Hal tersebut amatlah sangat penting karena Indonesia sedang menjalankan sebuah proses panjang menjadi suatu negara yang maju dan memiliki pengaruh dalam kepentingan-kepentingan dunia. Dalam upaya yang harus dilakukan untuk membangun pendidikan yang sesuai dengan kepentingan bangsa yaitu melalui cara yang lebih menekankan pada nilai-nilai kebudayaan serta pengetahuan yang diwujudkan oleh pemerintah, masyarakat, dan pada lingkungan keluarga (Prasetyo, dkk, 2020).

Untuk merombak seluruh rangkaian tatanan kegiatan pengembangan serta pendidikan wajib dilandaskan pada susunan yang sistematis, sehingga para peserta didik memiliki pengalaman untuk masa depan nya melalui proses pemahaman dan pengembangan belajar. Pada sistem pendidikan terdapat beberapa susunan yang memerlukan perhatian yang besar yang harus ditata secara sistematis serta dikembangkan secara baik agar dapat meningkatkan kualitas dalam diri peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dapat diketahui bahwa secara umum, dalam proses pendidikan mempunyai beberapa komponen-komponen yang fundamental yang sangat diperhitungkan, yaitu seorang pendidik, dimana pendidik adalah profesi yang memiliki peranan penting pada perkembangan pendidikan di Indonesia.

Kadangkala pendidik merupakan contoh yang baik bagi para peserta didiknya, dalam berpenampilan, perilaku, adab dan gaya bicara. Sehingga timbul adanya pernyataan bahwa penentu keberhasilan pendidikan terletak pada pendidik melalui kinerjanya dalam mengembangkan kemampuan dan pemahaman peserta didik serta kinerjanya pada tingkat institusional, instruksional. Dengan demikian pada proses menuju untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang baik serta profesional, hal tersebut tergantung bagaimana cara pengajaran yang dilakukan oleh pendidik (Kosasih, 2016).

Organisasi profesi pendidik yakni PGRI adalah salah satu organisasi pendidik (guru) di Indonesia yang mengupayakan untuk menciptakan sistem pelatihan pendidik yang berkualitas melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan serta wawasan tenaga pendidik. Organisasi profesi PGRI pula diharapkan menjadi inisiator bagi lahirnya ilmu pengetahuan pendidikan yang otonom serta inovatif, sehingga membantu pengembangan profesional profesi pendidik dalam menghadapi era globalisasi. Organisasi PGRI di masa mendatang dituntut untuk lebih memperjuangkan hak dan kewajiban, meningkatkan kesejahteraan, serta meningkatkan citra profesional dari para pendidik anggotanya (Murwaningsih, 2004).

Munculnya PGRI artinya adanya bentuk rasa dalam memperjuangkan kesejahteraan pendidik yang masih mempunyai konflik-permasalahan, hal tersebut membuat serikat para pendidik yang berskala kecil bergabung menjadi besar dan menjadi sebuah organisasi yang utuh dalam memperjuangkan kesejahteraan pendidik. Akhirnya dengan meleburkan semua perbedaan yang terdapat pada diri mereka akhirnya terbentuklah organisasi PGRI. Organisasi PGRI lahir pada 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang merupakan awal kongres PGRI ke-1 dan menjadikan pengaruh PGRI pada pergerakannya (Supriadi, 2003).

Saat itu lahir berbagai organisasi pendidik, seperti Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) yang berdiri pada tahun 1912. Setelah itu, ada pula Persatuan Guru Desa (PGD), Persatuan Guru Bantu (PGB), Persatuan Guru Sekolah (PGAS) Ambachts, dan lainnya. Pada tahun 1932, PGHB diganti dengan PGI (Persatuan Guru Seluruh Indonesia). Pada tahun 1945, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dibentuk oleh puluhan organisasi pendidik yang sepakat untuk bergabung. Organisasi profesi pendidik ini lahir sebagai wadah perjuangan pendidik, 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Sejarah perkembangan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sama tuanya dengan sejarah perjuangan pendidik di Indonesia. Sejak awal berdirinya, PGRI merupakan organisasi yang memperjuangkan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (organisasi perjuangan), meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan (organisasi kepegawaian), meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan mutu pendidikan (organisasi profesi).

Pada masa awal reformasi, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menghadapi tantangan di tingkat global, nasional, dan organisasi. Penting bagi pendidik untuk terus belajar dan berkembang di bidangnya, karena keberhasilan sistem pendidikan secara keseluruhan bergantung pada kualitas pendidiknya. Kualitas pendidik ditentukan oleh motivasi mereka sendiri untuk maju dan berkembang di bidangnya (PB PGRI, 2019).

PGRI merupakan suatu wadah tempat berhimpunnya para pendidik-pendidik dan tenaga kependidikan sebagai organisasi profesi, perjuangan dan ketenaga-kerjaan yang selalu memperjuangkan kesejahteraan pendidik, memberikan perlindungan terhadap pendidik, dan meningkatkan sumber daya manusia pendidik. Sebagai wadah persatuan pendidik, PGRI diharapkan menjadi pemersatu pendidik, sebagai wadah penyalur aspirasi kepentingan pendidik, sebagai alat perjuangan dalam menuntut kesejahteraan dan sebagai lembaga yang diharapkan mampu melindungi kepentingan pendidik dalam ranah advokasi hukum di seluruh tanah air Indonesia. Dengan adanya undang - undang sistem pendidikan nasional dan undang – undang guru dan dosen setidaknya semakin menguatkan peran organisasi ini dari mulai tingkat nasional, propinsi, kabupaten, dan kecamatan. Dengan jaringannya yang begitu luas dan banyak, menjadikan organisasi PGRI mengakar di Indonesia.

Perwujudan peran PGRI dalam mengupayakan kesejahteraan pendidik diantaranya melalui Undang – Undang Guru dan Dosen tahun 2005 sebagai harapan para tenaga pendidik. Wacana mengenai perlindungan terhadap kesejahteraan pendidik memang telah menjadi isu publik sejak tahun 1980-an, dengan berjalannya kondisi sosial pasca reformasi menguatkan kembali wacana tentang perlindungan terhadap ekonomi pendidik (Nurbaiti dkk, 2022).

Pemerintah Indonesia telah mengalami pergantian rezim yang menghasilkan suasana yang lebih positif. Orang-orang di Indonesia sekarang lebih terbuka, kebebasan pers, akademisi, dan organisasi lebih besar (Winters, 1999). Berakhirnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia telah mengantarkan era baru reformasi, membawa harapan baru bagi para pendidik di Jakarta. Era baru ini ditandai dengan fokus yang lebih besar

pada demokrasi dan transparansi, serta komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidik sekarang dapat secara terbuka mendiskusikan masalah dan menawarkan saran untuk perubahan, tanpa takut akan pembalasan. Ini telah menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif bagi semua orang yang terlibat dalam sistem pendidikan. Sejak tahun 2003 hingga 2005, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terlibat dalam berbagai perjuangan, terutama terkait dengan penerbitan peraturan perundang-undangan tentang hak, kualifikasi, kesejahteraan, dan sertifikasi pendidik. Pada tahun 2003, perjuangan dimulai dengan keluarnya Undang-Undang Sisdiknas yang mengawali reformasi di bidang pendidikan. Pada tahun 2004 dan 2005, serikat pekerja terus memperjuangkan lahirnya peraturan tentang kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, dan sertifikasi pendidik (PB PGRI, 2019).

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, agar bisa menjadi bahan pelajaran dan bahan referensi bagi para generasi masa depan ditempuh melalui metode sejarah. Dalam hal ini terdapat empat langkah kegiatan dalam metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam tingkatan heuristik merupakan tahapan mengumpulkan sebanyak-banyaknya sumber yang relevan. Sumber-sumber yang diperoleh antara lain dari surat kabar sezaman Kompas, artikel jurnal yang terkait dengan judul penelitian dan buku-buku organisasi yang diperoleh langsung dari PGRI DKI Jakarta. Sumber yang sudah terkumpul diuji melalui kritik sumber. Kritik sumber berarti usaha untuk menilai, menguji, serta menyeleksi sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan sumber yang autentik (asli). Kritik sumber terdiri atas kritik intern dan kritik ekstern. 1) Kritik intern adalah kritik sumber yang digunakan untuk meneliti kebenaran isi dokumen atau tulisan tersebut. 2) Kritik ekstern adalah kritik sumber yang digunakan untuk mengetahui keaslian sumber yang digunakan dalam penulisan. Agar diperoleh data yang benar-benar historis. Data teruji ditafsirkan informasi yang terdapat di dalamnya melalui interpretasi yaitu proses menafsirkan fakta sejarah yang telah ditemukan melalui proses kritik sumber sehingga akan terkumpul bagian-bagian yang akan menjadi fakta serumpun. Pada tahap terakhir disusun kisah dan uraian keseluruhan sejarahnya dalam bentuk historiografi (penulisan sejarah)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Pendidik Era Reformasi

Perubahan dan pembangunan sektor pendidikan tidak pernah akan mencapai tujuan akhir yang sempurna dan final. Hal ini terjadi karena sesuai dengan konteks pendidikan yang selalu dinamis, berubah dan tidak

pernah konstan, sesuai dengan perubahan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terjadinya perubahan-perubahan itu tidak dapat dicegah oleh kekuatan apapun. Hal ini membawa dampak pada cepat usangnya kebijakan maupun praksis pendidikan dan persekolahan di Indonesia. Perubahan dan tantangan Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa beberapa dampak negatif terhadap pendidik dan sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu dampak negatif adalah ketika rakyat terjebak pada euforia kebebasan, yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dan profesionalisme pendidik pada tahun 1998-2004 (Idris, 2011).

Pendidik adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi dan profesi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif. Kinerja pendidik profesional akan tercermin dalam pelaksanaan tugasnya yang dilandasi keahlian dalam materi maupun metode. Keahlian yang dimiliki oleh pendidik profesional diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang diprogramkan secara khusus untuk itu. Keahlian tersebut mendapatkan pengakuan formal yang dinyatakan dalam bentuk sertifikat, akreditasi, dan lisensi dari pihak berwenang (dalam hal ini pemerintah dan organisasi profesi). Dengan keahlian itu seorang pendidik mampu menunjukkan otonominya, baik sebagai pribadi maupun sebagai pemangku profesinya (Rohman, 2016).

Disamping keahliannya, sosok profesional pendidik dituntut melalui tanggung jawab dalam melaksanakan keseluruhan pengabdian. Pendidik profesional dituntut untuk mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai pendidik terutama dalam kaitannya dengan anak didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Pendidik profesional mempunyai tanggung jawab pribadi, social, intelektual dan spiritual. Tanggung jawab tercermin dalam kualitas pribadi yang mampu memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya dan menghargai serta mengembangkan dirinya (PB PGRI, 2008).

Sejak kongres ke-XVIII di Bandung tahun 1998, PGRI memasuki era baru, yaitu era reformasi yang penuh dengan segala dinamika dan tantangan yang harus dihadapi dengan penuh kecerdikan, kekuatan, dan keberanian demi untuk mempertahankan eksistensi PGRI dan beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya. Bersyukur semua tantangan baik internal maupun eksternal dapat diatasi sehingga eksistensi PGRI makin nyata dan diperhitungkan oleh berbagai pihak. Kongres ke-XIX lebih memacu PGRI untuk lebih eksis dalam perjuangan bagi dunia pendidikan dan pendidik. Rasanya tidak terlalu berlebihan jika dinyatakan bahwa pasca kongres ke-XIX di Semarang tahun 2003, menghantarkan PGRI untuk menjadikan Era Kebangkitan Pendidik. Di era ini pendidik Indonesia laksana raksasa yang

terbangun dari tidurnya selama beberapa decade terakhir (Subagia, dkk, 2008).

Problematika Tuntutan Pendidik Terkait Pendidikan Belum Tertuntaskan

Berdasarkan surat kabar Kompas Edisi 2 Mei 2000, diberitakan bahwa tak kalah seru dengan demo buruh menuntut perbaikan nasib, tahun tersebut penyandang profesi pendidik mencatatkan diri sebagai salah satu pelaku aktif demonstrasi. Dua pekan menjelang Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei, mereka berunjuk rasa dan mogok mengajar. Peristiwa itu memang langka, apalagi dimotori oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), lembaga paguyuban profesi pendidik, yang dimasa Orde Baru dimanfaatkan sebagai kendaraan politik di bawah naungan Golkar.

Isu yang para pendidik gelontarkan tak kalah menarik dengan isu-isu politik sekitar “melingar-lingkarnya” upaya pengikisan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) terutama soal pelaksanaan Tap MPR dalam kasus mantan Presiden Soeharto. Selain, mengancam memboikot Ebtanas, unjuk rasa memuncak dengan kedatangan puluhan ribu pendidik dari Jawa Barat di Gedung DPR Senayan. Setelah kantor Departemen Diknas didatangi, keesokan harinya diselenggarakan pertemuan Diknas, Kantor Badan Kepegawaian Nasional, dan PGRI. Dalam pertemuan itu disepakati usulan kenaikan tunjangan fungsional 300 persen. Dibanding dengan kenaikan 100 persen yang sudah diberikan sebelumnya, usulan itu besarnya 200 persen. Dua hari kemudian, usulan tersebut disetujui pemerintah, tetapi hanya bisa dilaksanakan satu tahun, karena terkait dengan kemampuan pemerintah.

Kenaikan rata-rata Rp 100.000, menurut penjelasan pemerintah akan membengkakkan penyediaan dana Rp 1,8 trilyun. Pemerintah tidak memiliki dana untuk kenaikan tunjangan tersebut. Bagi para demonstran, permasalahannya bukan karena ada tidaknya dana pemerintah, tetapi masalah komitmen dan pilihan prioritas. Pendidik cukup dinabobokan dan disanjung, tetapi dituding sebagai biang utama kemunduran mutu lulusan.

Keberhasilan pendidik memperjuangkan sendiri perbaikan nasib-nasibnya, patut disyukuri di tengah hiruk-pikuknya retorik aparat Depdiknas, yang sering justru tidak terkait langsung dengan “kesibukan” pendidik. Pembinaan dan pengembangan profesi kependidikan, utamanya menyangkut masalah kesejahteraan, masih belum berhasil. Padahal, mereka yang selama ini menerima saja apa yang diterima, mengalami kebingungan mengikuti silat lidah masalah perubahan kurikulum. Sebagai contoh ialah dilontarkan pernyataan tentang akan disusunnya suplemen

pengajaran sejarah menyangkut tiga peristiwa kontroversial, yani Serangan Oemoem 1 Maret 1949, G30S/PKI, Surat Perintah 11 Maret.

Pendidik mengalami kebingungan apalagi yang akan mereka susun, selama ini pendidik sejarah sudah memegang suplemen ketiga masalah itu, sebagai pelengkap sesuai kurikulum tahun 1994 sejak tahun ajaran 1999/2000 dimulai. Persoalan budi pekerti yang sehari-hari menjadi wacana, budi pekerti seolah-olah senjata pamungkas bagi persoalan kenakalan remaja, tawuran pelajar, dan lain-lain. Padahal budi pekerti yang dulu dianggap sukses, barangkali cocok untuk konteks sosial masa itu dan belum tentu cocok untuk era saat ini (Alhamudin, 2014).

Hari Guru Diwarnai Unjuk Rasa oleh Mahasiswa

Berdasarkan surat kabar Kompas Edisi 26 November 1998 diberitakan bahwa hari pendidik , Rabu 25 November bertepatan dengan dibukanya Kongres PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), diwarnai dengan demonstrasi oleh mahasiswa IKIP di Jakarta, Bandung, dan Padang. Pembukaan Kongres PGRI sendiri dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, oleh Presiden BJ Habibie, dihadiri Mendikbud Juwono Sudarsono dan para wakil dari peserta kongres.

Di Jakarta, ratusan mahasiswa IKIP Jakarta menggelar keprihatinannya di Kantor Depdikbud, Jl Jendral Sudirman, sejak sekitar pukul 11.00 WIB. Keinginn mereka untuk bisa bertemu Mendikbud baru terlaksana sekitar pukul 17.00 WIB. Menyangkut PGRI , mereka mendesak agar organisasi tersebut dibubarkan , karena mereka menganggap bahwa PGRI tak pernah bergiat memperjuangkan nasib pendidik. Sebaliknya, PGRI malah lebih banyak memposisikan diri sebagai alat politik Golkar. Menanggapi hal ini, Mendikbud menyerahkan masalah tersebut kepada para pendidik itu sendiri.

Para mahasiswa di Jakarta ini juga menuntut pemerintah untuk menaikan alokasi *budgeter* APBN untuk kepentingan pendidikan nasional. Seperti rekan-rekannya di Jakarta , para mahasiswa ini mengultimatum pembubaran PGRI dan menuntut peningkatan jumlah anggaran pendidikan minimal 30 persen dari total APBN. Ketua Panpendiks Pengurus Besar (PB) PGRI Dr Anwar Yasin dalam dialog dengan mahasiswa mengatakan, PGRI berjanji akan melakukan reformasi dan melepaskan diri dari kekuasaan. Dalam rangka reformasi, PGRI menyatakan siap dibubarkan, asal para anggota menginginkannya.

Anwar Yasin mengatakan, PGRI akan melakukan reformasi di berbagai bidang seperti konstitusi, program, sumber daya manusia, serta kinerja . Semua akan diubah berdasarkan aspirasi dari bawah (para anggota). Ia menyatakan pula bahwa di tahun 1998 , anggota PGRI

sebanyak 1,4 juta , tersebar di 27 provinsi dan 300 daerah tingkat dua serta kecamatan.

PGRI Teruji Keseriusannya Dalam Memperjuangkan Aspirasi Pendidik

Menurut surat kabar Kompas Edisi 25 November 1998 diberitakan bahwa, Pesatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) didirikan tanggal 25 November 1945 di Solo. Tanggal itu kemudian hari dijadikan Hari Guru Nasional, sama seperti tanggal kelahiran PWI tanggal 9 Februari dijadikan Hari Pers Nasional. Saat didirikan, aspirasi para pemegang profesi kependidikan tertampung dalam AD/ART. Asosiasi ini memperhatikan dan mengusahakan tertanganinya persoalan-persoalan kependidikan.

Ketika Golkar dilihat sebagai partai terbesar, secara politis *ruling party*, aspirasi dan persoalan kependidikan disalurkan melalui partai tersebut. Pimpinan terasnya pada saat itu adalah anggota Fraksi Karya Pembangunan di DPR. Ia mewakili kepentingan kependidikan. Dalam berbagai dengar pendapat dan rapat kerja, suasana dan aspirasi kependidikan memang dibicarakan, memperoleh bobot melalui kehadiran penpendidiks PGRI. Di pihak lain, banyak juga anggota PGRI yang merasa persoalan mereka tidak terwakili, bahkan PGRI secara kelembagaan justru menambah beban. Asosiasi ini dianggap main potong gaji, untuk pembangunan Wisma Pendidik, untuk majalah, dan untuk iuran lainnya. Main *faillt accompli*, langsung potong gaji oleh asosiasi menambah deretan jenis potongan mereka.

Saat era Golkar memperoleh tambahan suara dalam pemilu dari anggota PGRI, rasanya akan terhenti. Kalau RUU Politik yang sedang di godok itu menetapkan pegawai negeri sipil tak lagi masuk Golkar, maka jutaan pemegang profesi pendidik akan menentukan pilihan politik sesuai aspirasi masing-masing. Bahkan bukan tidak mungkin kalau PGRI semakin dirasa kurang aspiratif terhadap anggota, akan muncul asosiasi – asosiasi kependidikan lain. Era semacam itulah yang akan dihadapi, seiring dengan euforia refomasi yang belum juga selesai, bahkan terkesan arahnya semakin tidak jelas. Karena itu, meskipun pertemuan PGRI di Lembang Jawa Barat yang dimulai pada hari Selasa, 24 November 1998 bukan sebuah kongres, alangkah baiknya jika kesempatan itu dipakai untuk mendaftar kembali persoalan-persoalan kependidikan. Dari sana diperoleh focus arahan sebagai tolak ukur keabsahan, kuat dan tidaknya asosiasi PGRI sebagai asosiasi pemegang profesi kependidikan.

Pasang Surut PGRI Dalam Menuntut Nasib Pendidik

1. Hak Azasi Pendidik

Presiden Vietnam *Ho Chi Minh* menyatakan bahwa : “*No Teacher, No Education*” atau tanpa pendidik tidak ada Pendidikan. Motto itu

kemudian dijadikan landasan kebijakan pemerintah dalam membangun Vietnam yang berbasiskan pendidikan dengan pendidik sebagai intinya. Hal tersebut menyiratkan bahwa unsur inti yang paling esensial dalam pendidikan ialah pendidik dan peserta didik yang saling berinteraksi dalam situasi pedagogis untuk mencapai tujuan pendidikan. Tanpa kedua unsur itu, yaitu pendidik dan peserta didik tidak ada yang namanya pendidikan. Pendidik berperilaku mengajar dan peserta didik berperilaku belajar melalui interaksi belajar mengajar dalam suasana pendidikan.

Pendidik yang berperilaku mengajar secara professional akan menghasilkan perilaku yang efektif dan pada gilirannya akan menghasilkan keluaran (hasil belajar) yang bermutu. Pendidik belum mendapatkan haknya untuk dapat mengajar secara professional dan efektif, demikian pula peserta didik belum memperoleh haknya untuk belajar secara optimal dan efektif. Hal itu tercermin dari kondisi pendidik saat ini yang mencakup jumlah yang kurang sehingga harus bekerja melebihi lingkup tugasnya, mutu yang belum sesuai dengan tuntutan, distribusi yang kurang merata, kesejahteraan yang amat tidak menunjang, dan manajemen yang tidak kondusif. Semua itu merupakan cerminan rendahnya penghargaan terhadap pendidik dan kurangnya perhatian terhadap kondisi kehidupan pendidik serta hak azasinya.

Hak untuk mengajar adalah hak untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan sebagai pendidik berwenangan untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan peserta didik agar mencapai tujuan pendidikan yang dikembangkan secara demokratis. Sedangkan hak belajar adalah hak peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dalam mencapai perwujudan diri yang optimal sebagai pribadi, warga negara, dan hamba Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. Baik pendidik maupun peserta didik belum mendapat dukungan kondisi fisik, psikologis, dan social ekonomi yang memungkinkan terwujudnya kinerja mengajar dan belajar secara memadai untuk berlangsungnya proses pembelajaran secara efektif dan tercapainya hasil belajar optimal. (Roichatul dkk, 2017).

2. Perlindungan Terhadap Pendidik

Status of Teacher merupakan sebuah dokumen penting yang dihasilkan oleh ILO dan UNESCO pada tahun 1968 sebagai satu pengakuan secara global bahwa pendidik sebagai profesi, meskipun dalam kenyataannya belum terwujud secara signifikan. Dokumen berisi 147 pasal tersebut merupakan kesepakatan antar bangsa (termasuk Indonesia) dalam upaya memberikan jaminan perlindungan terhadap pendidik yang mencakup pengertian, ruang lingkup, dasar-dasar acuan, tujuan dan kebijakan pokok pendidikan, persiapan jabatan profesi pendidik, pendidikan lanjutan pendidik, pengangkatan, penempatan, dan karir

pendidik, hak-hak dan tanggung jawab pendidik, syarat-syarat mengajar dan belajar yang efektif, gaji pendidik. (Bawamenewi, 2024).

Hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan jabatan profesi pendidik tersirat dan tersurat dalam keseluruhan dokumen tersebut yang meliputi antara lain yang berkenaan dengan pendidikan pendidik, bantuan dalam kondisi darurat, perlakuan yang tidak diskriminatif, pengembangan karir, kesempatan yang terbuka untuk jabatan structural, perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, kebebasan otonomi dalam melakukan tugas professional, kebebasan berorganisasi kemasyarakatan, jaminan hari tua dan sebagainya (PB PGRI, 2008).

Perjuangan Mensejahterakan Pendidik

Sangat penting bagi setiap organisasi untuk memiliki tujuan bersama yang harus diperjuangkan. Menurut (Ambarwati, 2018) tujuan organisasi dapat mencakup mempengaruhi perkembangan organisasi, merekrut anggota, dan mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan suatu organisasi sangat mempengaruhi kinerja organisasi itu sendiri.

Untuk mencapai tujuan bersama, orang-orang yang terlibat dalam organisasi harus bekerja sama secara efektif. Tujuan organisasi sebagaimana digariskan oleh PGRI tertuang dalam visi dan misi yang telah disepakati bersama dan dilaksanakan melalui program kerja yang sesuai dengan visi dan misi PGRI. Salah satu tujuan yang selalu dikejar adalah kesejahteraan pendidik. Agar pendidik profesional, mereka harus mendapat imbalan jasa yang baik, mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya, dan pembinaan karir yang jelas. Jadi, tujuan program kerja PGRI adalah melanjutkan cita-cita proklamasi dalam menjaga kemerdekaan, khususnya dalam pembangunan pendidikan nasional yang profesional, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menyejahterakan pendidik.

Program kerja PGRI menitikberatkan pada penyediaan tenaga pendidik yang profesional untuk mencerdaskan anak bangsa. Untuk mencapai tujuan bersama, PGRI membangun hubungan kerjasama dengan penpendidiks baik secara vertikal maupun horizontal. Hubungan penpendidiks Ikatan Guru Indonesia tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan melalui unsur wakil ketua, unsur sekretaris umum, unsur bendahara, dan unsur biro sesuai bidangnya masing-masing, di bawah arahan ketua. Hubungan kerja sama antara Penpendidiks Besar PGRI dengan pemerintah bersifat horizontal, dimana kedua entitas berada pada level yang sama (Restoeningroem, dkk, 2022). Salah satu cita-cita Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) adalah mengimplementasikan UU Pendidik dan Dosen yang telah disahkan pada tahun 2005. UU ini dipandang sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik di Indonesia.

Tantangan bagi PGRI: Kesejahteraan Pendidik Adalah Suatu Kenyataan atau Masalah?

Sebagai organisasi ketenagakerjaan, PGRI merupakan wadah perjuangan hak-hak asasi pendidik sebagai pekerja, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan. Pendidik sebagai kelompok tenaga kerja profesional memerlukan jaminan yang pasti menyangkut hukum, kesejahteraan hak-hak pribadi dan warga negara. Siapapun sependapat bahwa "Pendidik" memegang peranan yang amat penting dalam upaya pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan.

Hal yang menyulitkan para pendidik adalah menjaga keseimbangan antara tuntutan untuk berbuat normative ideal dengan suasana kehidupan yang matrealistis, individualistis, kompetitif, konsumtif dsb. Factor yang mendasar terkait erat dengan kinerja profesional pendidik adalah "kepuasan kerja" yang berkaitan erat dengan "kesejahteraan" para pendidik. Kepuasan ini dilatar belakangi oleh factor-faktor : (1) imbalan jasa, (2) rasa aman, (3) hubungan antar pribadi, (4) kondisi lingkungan kerja, dan (5) kesempatan untuk pengembangan dan peningkatan diri. Dari aspek "Imbal jasa" baik yang bersifat materi ataupun non materi, harus diakui masih jauh dari "memberikan kepuasan" dan "keadilan". Dari sudut inilah para pendidik sudah tentu sangat mengharapkan agar "imbal jasa" dapat disesuaikan dengan syarat kualitas hidup yang memadai. Memang disadari bahwa masalah ini merupakan masalah nasional dan pemerintah terus menerus mengusahakan untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik dan sampai batas tertentu sudah banyak dirasakan kaum pendidik (Noor, 2019).

"Rasa aman" sebagai factor kepuasan kerja masih merupakan idaman para pendidik. Kalau menelaah berbagai kasus kejadian yang banyak muncul dewasa ini ada kecenderungan kondisi ini belum terwujud secara penuh. Masih banyak kasus pelecehan terhadap pendidik dalam berbagai bentuk di berbagai daerah. Factor kesejahteraan yang selanjutnya adalah "hubungan antar pribadi" yang sampai saat ini masih dirasakan belum memberikan perwujudan yang memuaskan. Dalam beberapa hal, solidaritas, kekeluargaan, para pendidik dalam berbagai aspek kehidupan baik pribadi maupun profesi telah terwujud antara lain melalui koperasi, pertemuan sejawat, seminar pendidikan, penataran, dsb (PB PGRI, Konprov, 2004).

Simpulan

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) adalah organisasi profesi guru terbesar di Indonesia. Ini merupakan wadah ideal untuk meningkatkan profesionalisme pendidik (guru), mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi pendidik, serta memperjuangkan nasib pendidik dan pendidikan pada umumnya.

Pendidik yang berperilaku mengajar secara professional akan menghasilkan perilaku yang efektif dan pada gilirannya akan menghasilkan keluaran (hasil belajar) yang bermutu. Kenyataan yang terjadi hingga saat ini pendidik belum mendapatkan haknya untuk dapat mengajar secara professional dan efektif. Hal ini lah yang menjadi alasan PGRI untuk terus berjuang dalam perbaikan nasib pendidik walaupun banyak aral melintang yang harus dihadapi oleh organisasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamudin (2014). *Sejarah Kurikulum Di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum)* , Nur El-Islam, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2014.
- Ambarwati, A. (2018). *Perilaku dan Teori Organisasi*. Media Nusa Creative.
- Bawamenewi, A (2024). *Perlindungan Guru dalam Pembinaan Karakter Siswa*. (Alhamudin, 2014)Bandung : Inetelektual Maifes Media.
- Idris, R (2011). *Perubahan Sosial Budaya Dan Ekonomi Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan*. Lentera Pendidikan, Vol. 14 No. 2 . Desember, 2011: 219.
- Kompas, "Wacana Publik Soal Pendidikan Tak Berarti Tuntutan Guru Selesai". Edisi 2 Mei 2000. Hal 4.
- _____. "PGRI, Teruji lewat Serius-Tidaknya memperjuangkan aspirasi keguruan". Edisi 25 November 1998. Hal 4.
- _____. "Hari guru diwarnai Unjuk Rasa". Edisi 26 November 1998. Hal 10.
- Kosasih, Ahmad. 2016. "Perjuangan Organisasi Guru Di Masa Revolusi Sejarah PGRI Di Awal Pendiriannya". Jurnal Sosio-E-Kons. Vol. 8. No. 2.
- Murwaningsih. (2004). Peranan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru",. Jurnal Ilmiah Guru "COPE", No. 01/Tahun VIII/2004.
- Nurbaity., Novianti, R., Handayani, Y. (2022). *Guru Dan Problematikanya Serta Peran Organisasi Guru (PGRI) Provinsi Dki Jakarta Dalam Memperjuangkan Nasib Guru SMA Di Dki Jakarta (1998-2015)*. Journal on Education Volume 05, No. 01, September-November 2022, pp. 1603-1612.
- Noor, M. (2019). *Guru Profesional dan Berkualitas*. Semarang : Alprin. PB PGRI.
2008. *Seratus Tahun Perjuangan Guru Indonesia*. Jakarta: PB PGRI.



WIKSA: PROSIDING PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

_____. 2019. Keputusan Kongres XXII Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nomor V/KONGRES/XXII/PGRI/2019 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Bab. IV pasal 4.

Prasetyo. A., Wargadalem. M.F., Dhita. N. A. SBK *Dinamika Konflik Antar Persatuan Guru Republik Indonesia Dan Partai Komunis Indonesia*. Fajar Historia Volume 3 Nomor 1, Juni 2019.

Restoeningroem., dkk. (2019). "*Sejarah Pendidikan Dan PGRI*". Tangerang: Pustaka Mandiri

Rohman, M. (2016). *Problematika Guru dan Dosen dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*. Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan, 14(1), 49–71

Supriadi, Dedi (Ed.). 2003. *Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan, dan Perjuangannya sejak Zaman Kolonial hingga Era Reformasi*. Jakarta: Depdikbud.

Winters, A Jeffrey. 1999. *Dosa-dosa Politik Orde Baru*. Jakarta: Djambatan.